

BAB II

KONSEP AHLUSSUNNAH WAL-JAMAAH :DINAMIKA POLITIK ISLAM

A. Latar Belakang Berdirinya Ahlussunnah Wal Jama'ah

Secara generik pengertian Ahlusunnah Wa Al Jama'ah (selanjutnya disebut Aswaja atau Sunni) adalah mereka yang selalu mengikuti perilaku Sunnah nabi dan para sahabatnya (*ma ana 'alaihi al-yaum wa ashhabi*). Aswaja adalah golongan pengikut yang setia mengikuti ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya.

Sedangkan menurut Dhofier (1982 : 148), Aswaja dapat diartikan sebagai para pengikut tradisi nabi dan kesepakatan ulama (Ijma' ulama). Dengan menyatakan diri sebagai pengikut nabi dan ijma' ulama, para Kiai secara eksplisist membedakan dirinya dengan kaum moderis Islam, yang berpegang teguh hanya Al – Qur'an dan al-Hadist dan menolak ijma' ulama.

Sebelum istilah Aswaja untuk menunjuk pada kelompok, madzhab, atau kekuatan politik tertentu, ada beberapa istilah yang digunakan untuk memberi identifikasi terhadap aliran dan kelompok yang nantinya dikenal sebagai Aswaja. Marshall Hadgson menyebutnya Jama'i Sunni, sedangkan pakar lain menyebutkan Proto Sunnisme (embrio aliran sunni). Akan tetapi, istilah yang paling umum digunakan adalah *Ahlusunnah wa Al Jama'ah* dan *Ahlusunnah wa Al Jama'ah wa al-atsar*. Istilah ini digunakan oleh kelompok madzhab Hambali untuk menyebut

kelompok dirinya yang merasa lebih berpegang pada perilaku nabi dan menentang kelompok rasionalis, filosofis, dan kelompok sesat. Secara generik pengertian Ahlusunnah Wa Al Jama'ah (selanjutnya disebut Aswaja atau Sunni) adalah mereka yang selalu mengikuti perilaku Sunnah nabi dan para sahabatnya (*ma ana 'alaihi al-yaum wa ashhabi*). Aswaja adalah golongan pengikut yang setia mengikuti ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya.

Sedangkan menurut Dhofier (1982 : 148), Aswaja dapat diartikan sebagai para pengikut tradisi nabi dan kesepatan ulama (Ijma' ulama). Dengan menyatakan diri sebagai pengikut nabi dan ijma' ulama, para Kiai secara eksplisist membedakan dirinya dengan kaum moderis Islam, yang berpegang teguh hanya Al – Qur'an dan al-Hadist dan menolak ijma' ulama.

Sebelum istilah Aswaja untuk menunjuk pada kelompok, madzhab, atau kekuatan politik tertentu, ada beberapa istilah yang digunakan untuk memberi identifikasi terhadap aliran dan kelompok yang nantinya dikenal sebagai Aswaja. Marshall Hadgson menyebutnya Jama'i Sunni, sedangkan pakar lain menyebutkan Proto Sunnisme (embrio aliran sunni). Akan tetapi, istilah yang paling umum digunakan adalah *Ahlusunnah wa Al Jama'ah* dan *Ahlusunnah wa Al Jama'ah wa al-atsar*. Istilah ini digunakan oleh kelompok madzhab Hambali untuk menyebut kelompok dirinya yang merasa lebih berpegang pada perilaku nabi dan menentang kelompok rasionalis, filosofis, dan kelompok sesat.

Selama ini yang kita ketahui tentang Ahlunnah waljama'ah adalah madzhab yang dalam masalah aqidah mengikuti Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi. Dalam praktek peribadatan mengikuti salah satu madzhab empat, dan dalam bertawasuf mengikuti imam Abu Qosim Al Junandi dan imam Abu khamid Al Gozali.

Kalau kita mempelajari Ahlunnah dengan sebenarnya, batasan seperti itu nampak begitu simple dan sederhana, karena pengertian tersebut menciptakan definisi yang sangat eksklusif Untuk mengkaji secara mendalam, terlebih dahulu harus kita tekankan bahwa Ahlunnah Waljamaah (Aswaja) sesungguhnya bukanlah madzhab, Aswaja hanyalah sebuah manhaj Al fikr (cara berpikir) tertentu yang digariskan oleh para sahabat dan muridnya, yaitu generasi tabi'in yang memiliki intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam mensikapi situasi politik ketika itu. Meski demikian, bukan berarti dalam kedudukannya sebagai *Manhaj Al fikr* sekalipun merupakan produk yang bersih dari realitas sosio-kultural maupun sosio politik yang melingkupinya.

Ahlunnah tidak bisa terlepas dari kultur bangsa arab "tempat Islam tumbuh dan berkembang untuk pertama kali". Seperti kita ketahui bersama, bangsa arab adalah bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku dan kabilah yang biasa hidup secara peduli. Dari watak alami dan karakteristik daerahnya yang sebagian besar padang pasir watak orang arab sulit bersatu dan bahkan ada titik kesatuan diantara

mereka merupakan sesuatu yang hampir mustahil. Di tengah-tengah kondisi bangsa yang demikian rapuh yang sangat labil persatuan dan kebersamaannya, Rasulullah diutus membawa Islam dengan misi yang sangat menekankan ukhuwah, persamaan dan persaudaraan manusia atas dasar ideologi atau iman. Selama 23 tahun dengan segala kehebatan, kharisma, dan kebesaran yang dimilikinya, Rosulullah mampu meredam kefanatikan *qabilah* menjadi kefanatikan agama (*ghiroh islamiyah*). Jelasnya Rosulullah mampu membangun persatuan, persaudaraan, ukhuwah dan kesejajaran martabat dan *fitrah* manusia. Namun dasar watak alami bangsa arab yang sulit bersatu, setelah Rosulullah meninggal dan bahkan jasad beliau belum dikebumikan benih-benih perpecahan, genderang perselisihan sudah mulai terdengar, terutama dalam menyikapi siapa *figure* yang tepat mengganti Rosulullah (peristiwa bani saqifah).

Perselisihan internal dikalangan umat Islam ini, secara sistematis dan periodik terus berlanjut pasca meninggalnya Rosulullah, yang akhirnya komoditi perpecahan menjadi sangat beragam. Ada karena masalah politik dikemas rapi seakan-akan masalah agama, dan aja juga masalah-masalah agama dijadikan legitimasi untuk mencapai ambisi politik dan kekuasaan.

Unsur-unsur perpecahan dikalangan internal umat Islam merupakan potensi yang sewaktu-waktu bisa meledak sebagai bom waktu, bukti ini semakin nampak dengan diangkatnya Ustman Bin Affan sebagai kholifah pengganti Umar bin Khattab

oleh tim formatur yang dibentuk oleh Umar menjelang meninggalnya beliau, yang mau tidak mau menyisahkan kekecewaan politik bagi pendukung Ali waktu itu. Fakta kelabu ini ternyata menjadi tragedi besar dalam sejarah umat Islam yaitu dengan dibunuhnya Kholifah Ustman oleh putra Abu Bakar yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Peristiwa ini yang menjadi latar belakang terjadinya perang Jamal antara Siti Aisyah dan Sayidina Ali. Dan berikut keadaan semakin kacau balau dan situasi politik semakin tidak menentu, sehingga dikalangan internal umat Islam mulai terpecah menjadi *firqoh-firqoh* seperti *Qodariyah*, *Jabbariyah* *Mu'tazilah* dan kemudian lahir Ahlussunnah. Melihat rentetan latar belakang sejarah yang mengiringi lahirnya Aswaja, dapat ditarik garis kesimpulan bahwa lahirnya Aswaja tidak bisa terlepas dari latar belakang politik.²³

B. Prinsip – Prinsip Perjuangan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Dalam pendekatan perjuangan Ahlussunnah Wal Jama'ah, ulama-ulama seperti halnya yang ada di dalam ormas Islam NU lebih banyak mengikuti dakwah model Walisongo, yaitu menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat dan tidak mengandalkan kekerasan. Budaya yang berasal dari suatu daerah ketika Islam belum datang dan apabila tidak bertentangan dengan agama akan terus dikembangkan dan dilestarikan. Sementara budaya yang jelas bertentangan ditinggalkan.

²³ Ali Maschan Musa, *Nasionalisme Kiai : Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, Surabaya : LKiS, 2007, hal.98-100

Karena identiknya gaya dakwah ala Walisongo itu, nama Walisongo melekat erat dalam jami'iyah NU. Dimasukkan ke dalam bentuk Bintang Sembilan dalam lambang NU.

Sebutan Bintang Sembilan identik dengan Nahdhatul Ulama. Secara garis besar, pendekatan kemasyarakatan NU dapat dikategorikan menjadi tiga bagian :

a. *Tawassuth* dan *I'tidal*, yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan *tatharruf* (ekstrime).

b. *Tasamuh*, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat.

c. *Tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah SWT⁶.

Karena prinsip dakwahnya yang model Walisongo itu, NU dikenal sebagai pelopor kelompok Islam moderat. Kehadirannya bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat. Bahkan sering berperan sebagai perekat bangsa.

Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang bertujuan melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlusunnah Waljama'ah. Arti Ahlusunnah Waljama'ah adalah para pengikut yang berpegang teguh kepada *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, *Al-Ijma'*, dan *Al-Qiyas*.

⁶ H. Soeleiman Fadeli, M. Subhan, S. Sos, *Antologi NU, Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, (LTNU) Jawa Timur, 2007, hal. 13.

Doktrin Ahlusunnah Waljama'ah berpangkal pada tiga panutan :

- a. Mengikuti paham Al-Asy'ari dan Al-Maturudi dalam bertauhid.
- b. Mengikuti salah satu madzhab fiqih yang empat (Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i dalam beribadah.
- c. Mengikuti cara yang ditetapkan al-Juanaidi al-Baghdadi dan al-Ghazali dalam bertarekat.

Penyusun anutan ini adalah ulama Ushuluddin, Syeikh Abul Hasan al-Asy'ari, maka penganutnya disebut *Asy'ariyah*. Walaupun pada hakekatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari hanya menggali, merumuskan, menyiarkan dan mempertahankan apa yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Menurut sejarahnya, istilah Ahlusunnah Wal Jama'ah muncul karena digunakan Asy'ari untuk mereka yang aqidahnya lebih berdasarkan Sunnah Rasul ketimbang akal. Dengan demikian tidak dapat menggunakan istilah itu untuk golongan pengikut madzhab, karena madzhab adalah hasil pemikiran manusia dan bukan ajaran Al-Qur'an dan AS-Sunnah. Memang ada perbedaan dengan golongan Syiah dan Muktazilah dalam prinsip.

Nahdatul Ulama (NU), dikenal sebagai organisasi yang berhaluan tradisional yang berlawanan dengan modernis. Disebut demikian, karena NU memang bertujuan untuk mempertahankan atau memelihara tradisi Islam yang disebut paham *ahlusunnah wa al Jama'ah* (Aswaja). Tradisi itu sebenarnya adalah sebuah konsensus besar di bidang teologi dan metode berfikir. Di bidang teologi, mereka mengikuti

aliran kalam Asy'ariah dan Maturidiyah. Di bidang fikih, mereka mengikuti empat mazhab besar. Yaitu, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Di Indonesia, ada juga organisasi-organisasi gerakan islam yang memang mengikuti madzhab yang lebih khusus lagi, khususnya hanya Syafi'i. Sedang di bidang tasawuf, mengikuti Al-Ghazali. Di dunia Islam, ada juga yang mengikuti mazhab yang lebih spesifik. Misalnya di Pakistan, yang umat Islamnya cenderung mengikuti madzhab Hanafi. Di Saudi Arabia, khususnya di Madinah, mengikuti madzhab Maliki dan di negara-negara Afrika Utara, banyak mengikuti mazhab Hambali. Umat Islam Indonesia sendiri di kenal sebagai penganut madzhab Syafi'i. Namun NU di Indonesia lebih "terbuka". Sehingga dalam pembahasan mengenai fikih atau hukum-hukum agama, NU bisa melakukan analisis perbandingan madzhab. Sebagaimana di lakukan oleh Ibn Rusyd, filsuf muslim abad pertengahan dari andalusia yang di kenal rasional itu. Anehnya, kitab fikih *Bidayatul Mujtahid* yang lintas madzhab itu tidak diajarkan di pesantren-pesantren NU, malahan di pondok modern Gontor, Ponorogo yang beraliran modernis itu.

Dengan haluan mempertahankan tradisi itulah, maka NU distigmatisasi dengan progresif sebagai cenderung kepada sikap konservatif yang dilawankan dengan progresif. Haluan itu umumnya dianggap curiga atau takut kepada perubahan dan kemajuan. Sikap ini berhadapan dengan sikap progresif yang selalu mendorong perubahan dan terbuka terhadap perubahan. Dalam konteks yang lebih baru, kelompok konservatif ini dianggap menghambat modernisasi atau pembangunan. Jika

modernisasi dan pembangunan umumnya ingin melakukan perubahan kelembagaan dan nilai-nilai tradisional yang dianggap menghambat maka kelompok konservatif ini cenderung menolak dan menghalangi perubahan tersebut.

Itulah gambaran atau persepsi masyarakat, khususnya di kalangan akademisi atau kaum modernis terhadap NU. Tapi apakah kenyataannya demikian, itulah persoalannya.

Dalam kenyataan sejarah, khususnya dalam perkembangan politik, NU justru tidak menampakkan konservativenessnya, terutama dari sikap dan perilaku politiknya. Di sini timbul pertanyaan, apakah politik itulah yang mendinamisasi NU ?. karena dalam politik, NU harus berhadapan dengan berbagai persoalan kenegaraan dan berinteraksi dengan berbagai kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Politik itulah yang mengharuskan NU merespons berbagai masalah yang di jumpai, sehingga timbul pemikiran-pemikiran baru. Karena itu maka NU berkembang sebagai kekuatan politik yang dinamis. Dalam kenyataannya, NU memang menjadi kekuatan politik, atau paling tidak memiliki nilai politik yang di pertimbangkan oleh berbagai kekuatan politik.

Di lain pihak, dalam gerakan Islam telah tumbuh apa yang kemudian sangat di kenal sebagai aliran fundamentalis. Aliran fundamentalis ini, ternyata lahir bukan dari rahim golongan NU yang tradisional, melainkan justru berhadapan dengan aliran fundamentalis. Dalam nomenklatur gerakan Islam, aliran ini disebut sebagai Salafiyah yang berorientasi pada pandangan para pendahulu yang masih dekat dengan

generasi Nabi (*the early beginners*). Mereka beranggapan Islam yang hidup pada waktu itulah yang merupakan Islam yang paling otentik. Dan mereka berpegang pada ajaran yang di nilai paling otentik, yaitu paham Salafiyah.

Sepintas terdapat kekaburan antara kelompok fundamentalis dan kelompok tradisional. Padahal keduanya berdiri pada sisi yang berhadapan. Aliran fundamentalis yang berorientasi pada *otentisitas* ajaran itu, bermula dari paham *Ibnu Taymiah* dan *Wahabisme*. Aliran yang ingin memurnikan ajaran Islam itu melihat golongan tradisional sebagai sarang *bid'ah* dan *khurafat*. Namun golongan tradisional menentang pandangan ini. Mereka menolak penilaian sebagai sumber *bid'ah*. Mereka beranggapan, bahwa mereka adalah pemelihara dan penerus tradisi yang disebut sebagai *ahlusunnah wal jama'ah* itu. Begitulah duduk perkaranya sehingga kelompok tradisional berhadapan dengan kelompok fundamentalis.²⁴

C. Ruang Lingkup Negara Bangsa

Konsep bangsa seperti yang di fahami dalam wacana politik sekarang memang termasuk barang baru, artinya muncul pada era kehidupan modern ini saja setelah revolusi Prancis pada tahun 1789 M. bangsa atau *nation* disini diartikan sebagai kesatuan orang-orang yang mempunyai kesamaan sejarah, kesamaan cita-cita dan perjuangan, kesamaan wilayah tempat tinggal dan pemerintahan. Meskipun kemungkinan diantaranya ada perbedaan dalam asal-usul keturunan (ras), keyakinan (agama), maupun bahasa. Faham nasionalisme modern sekarang mengacu pada pengertian *nation* atau bangsa seperti yang dikemukakan tersebut, seperti Indonesia

²⁴ Ibid

yang dalam kebangsaannya terdiri dari beberapa suku, beberapa ras, beberapa bahasa daerah, beberapa budaya dan tradisi lokal. Tetapi mereka semua menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia yang satu kesatuan (Tunggal Eka) diatas berbagai macam perbedaan-perbedaan (Bhineka). Dalam referensi keIslaman terutama yang berbahasa Arab, kata bangsa biasanya disebut dengan *qaum* dan kebangsaan disebut dengan *qaumiyah*. Tetapi setelah pengertian bangsa itu dikaitkan wilayah tempat tinggal yang mempunyai batas-batas tertentu seperti yang berlaku pada Negara Bangsa (*Nation State*) maka istilah kebangsaan berubah lebih populer dengan sebutan *Wathoniyah* dari pada *Qaumiyah*. Ada lagi beberapa kata yang mempunyai makna dekat dengan kebangsaan tersebut, seperti *sya'biyah* (*peoples*), dan *ummah* dan yang membedakan pengertiannya adalah konteks dimana istilah-istilah tersebut dipakai.

Bagian awal literatur politik yang diwarisi dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. adalah *As-Shahifah*. Yakni dokumen yang kerap dikenal sebagai Piagam Madinah, yang kebanyakan dihubungkan dengan episode Hijrah antara tahun 622 – 624 M. konstitusi itu menyebut kaum mukmin membentuk satu umat yang menyertakan kaum Yahudi Madinah. Meskipun terdiri atas suku-suku. Tapi masing-masing harus bertanggung jawab atas perilaku anggotanya. Umat sebagai satu keseluruhan (kesatuan) bertindak secara kolektif dalam menegakkan tatanan sosial dan keagamaan, serta dalam melawan musuh saat perang dan damai. Perlu kiranya disini dikutip beberapa bagian teks dari Piagam Madinah tersebut seperti yang dinukil oleh beberapa sejarawan Islam klasik semisal Ibnu Hisyam, Ibnu Katsir masing-masing

dalam kitabnya *As-Sirah an-Nabawiyah*, sampai ke sejarawan masa kini seperti Dr.A. Basith Badar, dalam *At-Tarikh as-Syamil li al-Madinah al-Munawarah*¹¹.

Pada awalnya, setidaknya sampai dengan zaman pra modern, umat Islam tidak mengenal nasionalisme. Adapun yang dikenal hanya dua konsep *teritorial-religius*, yaitu wilayah damai dan wilayah perang. Oleh karena itu, munculnya konsep negara-bangsa telah melahirkan ketegangan historis dan konseptual¹².

Meski demikian, di dalam Islam dikenal dua terminologi yang mendekati konsep negara-bangsa, yaitu kosa-kata *millah* dan *ummah*, yang berarti masyarakat. Akan tetapi, istilah tersebut lebih mengacu pada kelompok *sosio-religius* bukan kepada masyarakat politik. Pada pihak lain, konsep negara-negara mengacu atas kriteria etnisitas, kultur, bahasa, dan wilayah serta mengabaikan unsur religius. Sedang pada tataran institusional, konsep negara-bangsa berbenturan dengan konsep khilafah atau pan-Islamisme.

Nasionalisme dunia Islam, jika diurut dari sejarah negara-negara muslim yang telah terlebih dahulu bersentuhan dengan masyarakat dan negara Eropa. Dalam realitas sejarah, tidak semua ide dan model nasionalisme yang ada di Eropa dapat diterima oleh masyarakat Islam, namun juga tidak dijumpai negara dan pemikir

¹¹ Muhammad Tholhah Hasan, "*Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*", Lantabora Press-Jakarta, 2005, hal. 340

¹² Azyumadi Azra, *Pergolakan politik islam*, Jakarta, Paramadina, 1996, hal. 11.

muslim yang secara terang-terangan menentang dan menempatkan dirinya pada posisi yang *antagonistik* terhadap Eropa¹³.

Ada fenomena menarik dari perilaku komunitas *Nahdliyin* berkenaan dengan wawasan paham *Ahlsunnah Wal Jama'ah*. Dalam salah satu peristiwa nasional, Muktamar NU di Lirboyo November 1999 serombongan jamaah datang tanpa mempedulikan aturan protokoler yang telah ditetapkan. Mereka tidak begitu memahami perbedaan antara pertemuan resmi dan tak resmi. Mereka hanya berkeyakinan bahwa kehadirannya di arena pertemuan para ulama ini akan mendapat barokah. Isi pembicaraan muktamar sendiri menjadi kurang penting, bahkan seberapa pengunjung di antaranya tidak mengetahui sama sekali. Yang terpenting dari kehadirannya adalah dapat bertemu kiai. Meskipun pada kenyataannya tidak lebih dari sekedar melihat dari jauh barisan para kiai yang baru akan mengikuti upacara pembukaan muktamar yang kebetulan di hadiri oleh Ketua Umum Lembaga Eksekutif (Tanfidzyah) PBNU yang saat itu telah merangkap jabatan sebagai Presiden RI, KH Abdurrahman Wahid.

Beberapa bulan sebelum peristiwa Lirboyo itu berlangsung, mereka pernah ikut terlibat dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum tahun 1999. pada beberapa pemilu sebelumnya mereka juga biasa terlibat mulai dari pemasangan tanda gambar, berteriak-teriak dalam kampanye terbuka, sampai pada saat pemilihan umum di laksanakan. Tapi kali ini agak berbeda, sebab partai yang akan di pilihnya

¹³Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Jogjakarta, LkiS, 2007, hal. 47.

mencitrakan organisasi panutannya Nahdlatul Ulama. PKB adalah partai yang dideklarasikan oleh seorang ulama pemimpin NU KH Abdurrahman Wahid. Dalam batas-batas pemahaman fikih yang diautnya sejak pertama kali belajar agama, keterlibatannya dalam pesta tersebut merupakan bagian jika sewaktu-waktu pesta itu meminta korban jiwa, hal itu diyakini sebagai *Syahid*¹⁴.

Di pesantren-pesantren tradisional, fenomena sosial seperti ini merupakan gambaran identitas yang langsung ataupun tidak langsung. Telah di pelihara dari generasi ke generasi. Pengabdian kepada keyakinan agama dalam bentuk-bentuk perilaku ritual dan sosial yang di lakukannya diikat dalam satu kalimat : *Ahlusunnah Wal Jama'ah (Aswaja)*. Kalimat ini di pahami sebagai etika dalam melakukan apa pun baik ibadah formal (*mahdhah*) maupun ibadah sosial (*ghairu mahdhoh*). Bahkan bagi lapisan sosial tertentu dari keanggotaan kaum *Nahdliyin*, doktrin Aswaja ini di pahami sebagai prinsip ajaran dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sehingga dengan keyakinan yang sama, orang-orang (Islam) yang tidak menganut ajaran Aswaja ini otomatis dianggap sebagai *out-group*¹⁵ dan dinilai tidak sempurna dalam beragama.

Negara Republik Indonesia terbentuk melalui proses pertumbuhan dan perjuangan panjang putra-putra bangsa yang penuh pengorbanan. Di dalam proses yang panjang itu para ulama dan Zu'ama sebagai bagian dari bangsa ini telah ikut meletakkan dasar-dasar kehidupan kebangsaan Indonesia yang bersatu, terjalin dalam

¹⁴ Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*, Jakarta : LP3ES, 2004, hal. 123

¹⁵ Uraian mengenai "out-group" dan "in-group", Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994, hal. 144.

pengelompokan yang berdasar kesukuan dan kedaerahan. Di masa perjuangan melawan ke Indonesia dan terus mengembangkannya dalam perjuangan kemerdekaan hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang melahirkan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu atas rahmat Allah SWT.

Dalam proses yang panjang itu, umat Islam di kawasan nusantara ini telah memberikan peran aktifnya berupa amal-amal nyata, membentuk manusia yang beriman, berakhlak karimah, cerdas dan terampil, membangun kehidupan keluarga dan masyarakat secara baik. Lebih dari itu bahkan melawan dan menolak penjajah, kemudian mempersatukan manusia dan komunitas dalam suatu keluarga besar menjadi satu bangsa dan pada akhirnya memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara hingga kemudian mempertahankan serta mengisi kemerdekaan itu.

Peranan aktif tersebut di sumbangkan oleh umat Islam di Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang di dasari semangat¹⁶.

Dalam tahun 1882 Ernest Renan telah mengemukakan pendapatnya tentang paham Bangsa itu. Menurut pujangga ini ada suatu nyawa, suatu asas akal yang terjadi dari dua hal¹⁷ : Pertama, rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat. Kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama,

¹⁶ Dr. H. M. Djamaludin Miri, Lc, *Ma dkk, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926 –1999 M),*LTN NU Jawa Timur, 2004 hal. 190

¹⁷ Iman Toto K. Rahardjo & Suko Sudarsono, *Bung Karno, Islam, Pancasila & NKRI,* Komunitas Religius Indonesia, Jakarta, Desember 2006, hal. 5.

bukannya persamaan tubuh, bukan pula batas-batas negeri yang menjadikan Bangsa itu.

D. Karakteristik Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Politik

Studi-studi teoritis tentang hubungan Islam dan politik yang dilakukan para ahli keislaman, kebanyakan berada dalam prespektif hubungan Negara dan masyarakat sehingga khasanah studi yang lebih kecil, yang membahas tentang hubungan interaksional antara ajaran Islam dengan tindakan politik kurang disentuh, walaupun ada masih sangat sedikit.

Teori hubungan politik dan agama di dalam Islam, antara lain dimaknai sebagai hubungan antara agama dan negara yang tak terpisahkan, seperti yang telah dikonsepsikan oleh para pemilik politik mazhab Syi'ah, Al-Maududi, Al - Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan beberapa tokoh yang lain.

Dalam pandangan para tokoh ini, wilayah agama dan negara tidak dapat dipisahkan, wilayah agama juga meliputi wilayah politik atau negara. Oleh karena itu menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan karena kedaulatan itu memang berasal dari dan berada ditangan Tuhan. Pandangan inilah yang juga disebut sebagai fundamentalis Islam.²⁵

²⁵ Ali Maschan Musa, *Nasionalisme Kiai : Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, Surabaya : LKiS, 2007, halaman 23 - 24

Menurut Al-Maududi syari'ah Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik antara agama negara. Syari'ah merupakan totalitas pengaturan kehidupan manusia yang tidak mengandung kekurangan sedikitpun. Negara harus didasarkan pada empat prinsip, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan (Khalifah), dan menerapkan musyawarah.²⁶

Negara merupakan sarana politik untuk mengaplikasikan hukum tuhan. Dalam kaitan ini, kebangkitan jama'ati Islami merupakan representasi al-Maududiyah di bidang politik yang bertujuan untuk menerapkan syariat dalam konteks kehidupan kenegaraan. Pikiran pikiran al-maududi banyak mengilhami praktik politik di Pakistan ketika dibimbing oleh Zia Ul Haq. Menurut Al-Maududi institusi negara islam terdiri dari kepala negara dan lembaga legislatif. Posisi pentingnya terletak ditangan kepala negara yang disebut sebagai *Imam*, kholifah. Atau amir.

Pemikiran politik yang memandang hubungan agama dan negara bersifat *symbiotik* yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini negara membutuhkan agama sebagai dasar atau pijakan kekuatan moral sehingga ia dapat menjadi mekanisme kontrol. Sementara disisi lain agama memerlukan agama sebagai sarana untuk pengembangan agama itu sendiri.

²⁶ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara ; Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1995, halaman 166

Adapun yang sangat menonjol dalam studi religio-politik dalam wacana ini ialah pemikiran Al-Mawardi. Bukunya yang sangat terkenal dibidang keagamaan bertitel *Al Ahkam Asy Sulthaniyah*. dalam pandangan Al-Mawardi kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur agama. Pemeliharaan dan pengaturan dunia adalah dua dimensi yang berhubungan secara simbiotik. Dengan demikian, negara berada dibawah kontroll agama. Dalam pengangkatan kepala negara melalui pemilihan, ia membagi umat Islam menjadi dua kelompok, yakni *ahl al- ikhtiyar* dan *ahl al- imamah* termasuk yang pertama diartikan sebagai kelompok masyarakat yang dapat memberi wewenang kepada kepala negara untuk mengatur masyarakat melalui proses pemilihan terlebih dahulu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adil, berilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, tidak cacat fisik, laki-laki mempunyai wawasan politik.²⁷

Pemikiran lain yang cukup menonjol dalam wacana ini adalah Abdul Hamid Al- Ghozali. Menurutnya negara dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan pemenuhan kebutuhan akan industri dan profesi sehingga kepala negara harus memiliki sumber legitimasi keagamaan. Industri yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat ialah pertanian, pemintalan yang didukung oleh pembangunan dan politik sedangkan profesi politik yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat ialah sub profesi pengukuran tanah sub profesi ketentaraan, sub profesi kehakiman sub profesi ilmu

²⁷ Imam Al- Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syaieat Islam*, Jakarta, Darul Falah, 2006 . hal.21

hukum. Begitu pentingnya sub profesi politik tersebut, Al-Ghozali menyatakan bahwa kedudukannya berada satu tingkat dibawah kenabian.

Disisi lain menurut Al-Ghozali pemilihan kepala negara bukanlah keharusan rasional, melainkan keharusan agama. Hal ini di dasarkan pada pemikiran bahwa kesejahteraan ukhrowi harus dilakukan melalui pengamalan dan pengahayatan didunia secar benar. Inilah yang di jadikan argumen bahwa antara negara dan agama merupakan dua hal yang saling membutuhkan.²⁸

Pemikiran politik yang memandang hubungan agama dan negara bersifat *sekularistik*. Pandangan ini menolak hubungan yang bersifat sibiotik maupun intregratik.

Dalam konteks keindonesiaan, menurut Adnan, hubungan agama dan negara dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama kelompok akomodatif . kelompok ini di pelopori oleh Nur Kholis Majid. Nur Kholis Majid berpandangan bahwa kahidupan spiritual diatur oleh agama dan kehidupan duniawi diatur oleh logika duniawi. Pemikiran ini seolah mengandung elemen sekularistik, yaitu adanya upaya memisahklan antara agama dengan dunia, meskipun yang sebenarnya hanyalah perbedan wilayah: ada wilayah yang semata-mata urusan agama dan ada wilayah yang semata-mata duniawi. Pemikiran seperti ini dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari “Islam politik” ke “Islam kultural”. Sebagai akibatnya, Islam berwatak liberalis dan humanis yang menawarkan kebebasan dan kemanusiaan bagi

²⁸ Op Cit.76-79

penganutnya, dari pada watak politis yang menakutkan, utamanya bagi penyelenggara negara. *Kedua*, kelompok *moderat* dengan tokoh Amien Rais, Jalaluddin Rahmat, Dan Imaduddin Abdurrahim. Kelompok ini berpendirian bahwa Islam tidak hanya dipahami sebagai agama, tetapi juga sebagai ideologi. Islam adalah agama totalistik yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kehidupan sosial politik,

Ketiga kelompok *idealis-Radikal*. Kelompok ini beranggapan bahwa Islam berada di atas semua ideologi sehingga untuk memperjuangkannya diperlukan cara-cara kekerasan dan sekaligus menolak ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan berorganisasi sosial masyarakat dan bahwa agama harus menjadi ideologi menggantikan Pancasila, pandangan ini dapat dilihat pada visi dan aksi Abdul Qadir Jaelani.²⁹

²⁹ Nur Kholis Madjid, *Islam Keindonesiaan Dan Kemodernan* Jakarta : Para Madina, 1993, Hal. 23,